

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur.

Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9).

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi kebijakan diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17).

Dari beberapa defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa diantara model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

2.2.1. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III

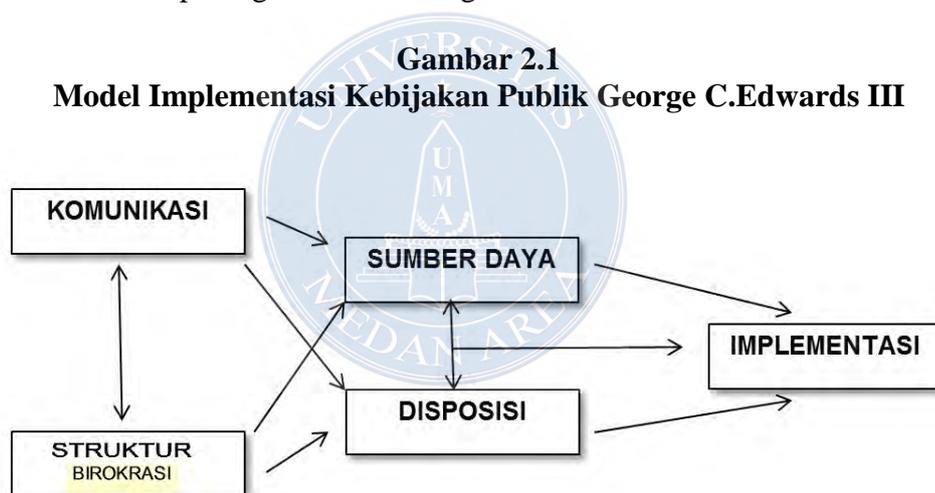
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Menurut George C. Edwards III ada kerangka berpikir ada 4 (empat) variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Penyederhanaan pengertian dengan cara mem*breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sesuai dengan gambar 2.1, maka faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksanaan kebijakan (*policy implementors*). (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

b. Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”.

Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*”.

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.

Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan

langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia (Staf)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

4. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

5. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap *implementor*. Jika *implemetor* setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon *implementor* terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program, karena sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program

agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

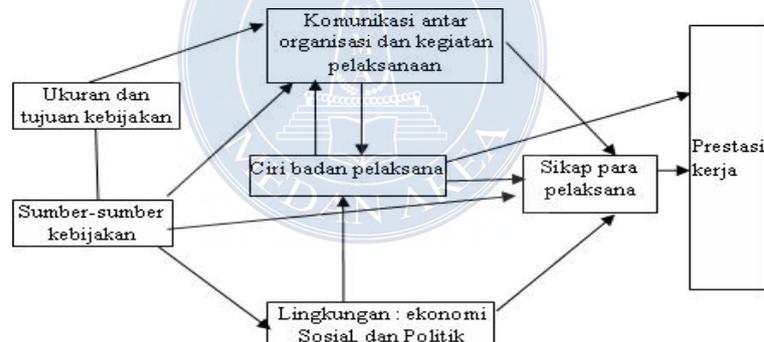
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975).

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn



Berdasarkan gambar 2.2, maka model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*).

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang

dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan

Dari kedua model implementasi kebijakan publik di atas, maka yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III.

2.3. *Good Governance*

Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup tiga domain yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat.

Good Governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai

kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, UNDP, 1999*).

Hal ini diperkuat dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* seperti yang dituliskan oleh Sedamayanti dalam bukunya berjudul “Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan”, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Transparansi, dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif dengan tujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi tentang peraturan, hukum dan anggaran;
3. Prinsip efisiensi dan efektivitas, yakni terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja; dan

4. Supremasi hukum, yakni adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Salah satu wujud dari *good governance* adalah adanya partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah itu sendiri. Ditinjau dari segi organisasi, pemerintah daerah merupakan organisasi bersistem terbuka (*open system*). Organisasi pemerintahan seperti ini ditandai oleh adanya impor energi (*import or energy*) dari lingkungannya agar dapat berfungsi dengan sebaik-sebaiknya (Kadir, 2015: 99).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang melibatkan *stake holder* melalui prinsip-prinsip *good governance*.

2.4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Sutanto (2003:3) sistem adalah “Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.

Sutanto (2007:46) mendefenisikan informasi sebagai “Hasil Pengelola data yang memberikan arti dan manfaat”.

Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) sebagai “Suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut McLeod (2010:11) “Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”.

Menurut Kumorotomo (2004:9) menjelaskan bahwa “Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*)”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi

2.5. Manfaat dan Kualitas Informasi

2.5.1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :

a. Menambah pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

b. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.

c. Mengurangi risiko kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.

e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2.5.2. Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto (2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

- a. Akurasi (*accuracy*);
- b. Ketepatan waktu (*timelines*);
- c. Relevan (*relevance*);
- d. Agregasi (*agregacy*);
- e. Pemformatan (*formatting*).

Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (*uniqueness*), ketepatan (*conciseness*), kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan (*read ability*).

2.6. Proses Sistem Informasi Manajemen

Menurut Parker, sebagaimana dikutip Kumorotomo dan Margono (2009:16) Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer adalah “Suatu sistem informasi manajemen yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting”.

Secara garis besar Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

2.6.1. Manusia

Setiap Sistem Informasi Manajemen yang berbasis harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen.

2.6.2. Perangkat Keras (*hardware*)

Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin, karena itu, perangkat keras terdiri dari komputer beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran, perkakas penyimpanan dan perkakas komunikasi.

2.6.3. Perangkat lunak (*software*)

Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah

intruksi-intruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Program komputer biasanya disimpan di dalam medium *input/output*, misalnya disket, pita atau *compact disk*, untuk selanjutnya dipakai komputer dalam fungsi pengolahannya.

2.6.4. Data

Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan dipilahkan, dimodifikasi atau diperbarui oleh program-program komputer supaya menjadi informasi tersebut.

2.6.5. Prosedur

Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer, misalnya saja peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang disuatu instansi harus tercatat di dalam basis data komputer atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induknya harus dilaporkan waktu dan otoritasnya.

Dengan sedikit menyimpulkan pendapat Parker bahwa sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Dimana secara teknis pelaksanaan sistem informasi meliputi empat bagian, yakni input, pengolahan, penyimpanan dan output.

Selain itu sistem informasi merupakan sekumpulan *hardware*, *software*, data dan prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data

menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan.

2.7. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.7.1. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;

- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*;
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good governement*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin);
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhandimana output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku dan Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.7.2. Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah;
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

2.7.3. Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008), yaitu:

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan Pengelola informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
- c. Organisasi pengolahan dan Pengelola informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik;
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung Pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi.

2.8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam Pengelola keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.8.1. SIMDA Keuangan Versi 2.7

Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Ver 2.7 berbasis akrual antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Mekanisme dan output penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan output akuntansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Aplikasi ini didukung dengan pedoman penyusunan perkada kebijakan akuntansi dan sistim akuntansi pemerintah daerah berbasis aplikasi SIMDA akrual.

2.8.2. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan versi 2.7 Berbasis Akrual adalah :

a. Penganggaran

- 1) APBD dan Perubahannya;
- 2) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- 4) Surat Penyediaan Dana (SPD);

b. Penatausahaan

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4) Surat Tanda Setoran (STS);
- 5) Register; dan
- 6) Surat pengendalian lainnya.

c. Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo (LPSAL)
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Neraca
- 6) Laporan Arus kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.8.3. Fungsi Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrua

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis

Akrua adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;

- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP) audit*.

2.9. Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

2.9.1. Keunggulan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Keunggulan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

2.9.2. Manfaat SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara

otomatis telah melaksanakan Pengelola keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kestinambungan *Maintenance*

Dengan lokasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja.

Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

4. Terintegrasi

SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA Keuangan juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis sehingga, setiap

transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

5. Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA Keuangan ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasi lainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA Keuangan, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Besaran jumlah dan yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA Keuangan ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA Keuangan, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

maupun pihak pemerintah daerah sebagai *counterpart*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan satu tim asistensi SIMDA Keuangan, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani).

Sementara pihak pemerintah daerah mengarahkan Sumber Daya Manusia dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator *database*, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satuan Kerja (Satker).

Khusus untuk administrator *database* SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi. Proses *transfer knowledge* dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe *counterpart*.

Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih *administrator data base*. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari *business process* program aplikasi SIMDA bagi *administrator* dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya *troubleshooting*.

Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Setelah sumber daya manusia diperoleh, mereka harus dikembangkan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap melalui latihan dan pengembangan agar menjalankan tugas dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia penting, karena perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (Sedarmayanti, 2016:16).

2.10. Peneliti sebelumnya

2.10.1. Sri Padmowati pada tahun 2004 dengan judul penelitian “Implementasi Sistem Informasi Daerah di Kabupaten Jepara”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggapan pegawai terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) adalah positif, artinya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sangat setuju dalam hal pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIMDA);
2. Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan yang sedang pada taraf signifikansi 95% dengan besar koefisien korelasi antara dua variable adalah 0,430. Dengan kata lain pendidikan dan pelatihan

merupakan salah satu factor penting dalam implementasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA);

3. Kemampuan Kerja pegawai dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) masih sedang, hal ini dilihat dari jawaban responden 48,3% yang menyatakan bahwa pegawai dalam unit kerja belum mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan belum dapat menginformasikan output serta input dari masing-masing unit kerja.

2.10.2. Rayambong Sumuang Sitohang pada tahun 2015 dengan judul penelitian

''Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi''.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada pemerintah Kabupaten Dairi harus memperhatikan faktor sumber daya dan disposisi sehingga permasalahan dan kendala yang muncul dapat diselesaikan;
2. Untuk meningkatkan transparansi, konsolidasi data keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat perlu penggunaan Sistem Informasi keuangan tunggal yang berbasis web sehingga data keuangan seluruh pemerintah daerah dapat dilihat secara *real time*.